



Vol. 12 No. 3 September 2025

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 13-23

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

## Analisis Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Lewotobi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Boru)

Kristina Ago Lewar<sup>1</sup>, Konstantinus Pati Sanga<sup>2</sup>, Petrus Da Silva<sup>3</sup>  
Universitas Nusa Nipa, Indonesia<sup>1234</sup>

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Boru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Korespondensi Penulis: [lewarkristina28@gmail.com](mailto:lewarkristina28@gmail.com)

### Abstract.

*This research aimed to determine how the Village Revenue and Expenditure Budget was managed in handling emergency caused by the volcanic eruption in Boru Village, Wulanggintang Sub-district, East Flores Regency. The Lewotobi volcano eruption disaster that occurred at the end of December 2023 required the village government to make quick and appropriate budget adjustments. This research used a qualitative approach with the Miles and Huberman analysis method, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and observation. The results of the research showed that the Village Revenue and Expenditure Budget planning was carried out adaptively through a Special Village Meeting. The implementation of emergency funds was effective despite communication constraints, and administration and reporting were still carried out despite delays. The village government had formally accounted for its actions to the regional government and strove to build transparency with the community. This research supported the stewardship theory, in which village governments acted as trustees of the community in managing public finances. This research was also in line with several previous studies that emphasize the importance of accountability and participation in village fund management, especially in crisis situations.*

**Keywords:** Village Revenue and Expenditure Budget Management, Disaster Management, Stewardship, Miles and Huberman, Village Finances.

### Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan darurat bencana erupsi gunung di Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur. Bencana erupsi gunung Lewotobi yang terjadi pada akhir Desember 2023 menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDes dilakukan secara adaptif melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), pelaksanaan dana tanggap darurat berjalan efektif meskipun terdapat kendala komunikasi, dan penatausahaan serta pelaporan tetap dijalankan meskipun mengalami keterlambatan. Pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban

secara formal kepada pemerintah daerah dan berupaya membangun transparansi kepada masyarakat. Penelitian ini mendukung teori *stewardship*, di mana pemerintah desa bertindak sebagai pengembal amanah masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam situasi krisis.

**Kata Kunci:** Pengelolaan APBDes, Penanganan Bencana, *Stewardship*, Miles dan Huberman, Keuangan Desa

## 1. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada desa seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Daling (2013:45)

Desa merupakan pemerintahan yang sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap elemen dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan dirasakan langsung oleh masyarakat. Desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo, 2018-179)

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa saat ini, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa, demikian amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Topik tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, hasil penelitian Oleh Aisyah & Amin (2021) tentang Tata Kelola Dana Desa di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa Dalam Penanganan Covid-19 (studi kasus pada Nagari Situjuh Batua), Hasil penelitian ini menunjukkan tata kelola Dana Desa bidang penanggulangan bencana darurat mendesak Desa Nagari Situjuh Batua dinilai sangat baik, hal ini dapat dilihat dari praktik pengelolaan dana desa tersebut pada program-program yang dapat mengentaskan perkembangan covid-19. Tata Kelola Dana Desa bidang penanggulangan bencana dan mendesak desa Nagari Situjuh Batua dialokasikan untuk beberapa kegiatan dalam penanganan covid-19.

Banyak penelitian tentang pengelolaan APBDes berfokus pada alokasi anggaran untuk pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat, namun sedikit sekali yang membahas tentang bagaimana dana desa digunakan secara spesifik untuk penanganan bencana. Berdasarkan identifikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pengelolaan APBDes dalam penanganan darurat bencana erupsi gunung, dilakukan pada pemerintahan Desa Boru yang terdampak langsung erupsi gunung Lewotobi.

Desa Boru Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur, merupakan satu daerah yang rentan terhadap bencana erupsi gunung karena berada dikawasan rawan bencana. Erupsi gunung berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun dampak ekonomi dan sosial. Pemerintah desa sebagai garda terdepan harus mampu merespon dan menangani situasi darurat ini dengan baik.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa Boru.

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Sub-bidang Penanggulangan Bencana	56.000.000	56.000.000	100%
Sub-bidang Keadaan Mendesak	115.000.000	115.000.000	100%
<b>Total</b>	<b>171.200.000</b>	<b>171.200.000</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Desa Boru

Laporan ini disusun untuk menjelaskan Realisasi Anggaran dalam bidang penanggulangan bencana darurat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Boru pada tahun anggaran 2024. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat serta memastikan kesiapsiagaan desa terhadap bencana.

Berdasarkan tabel laporan realisasi anggaran bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa, dapat disimpulkan bahwa seluruh anggaran sebesar Rp171.200.000 telah direalisasikan 100%, hal ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak telah terserap sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal.

Pada tahap perencanaan akhir tahun 2023, Desa Boru telah menetapkan LKPDes sejak 27 September 2023. Namun, pada 23 Desember terjadi erupsi gunung api. Artinya, saat itu proses perencanaan masih berlangsung dan belum memasuki tahap penganggaran. Meskipun demikian, dalam bidang perencanaan, terdapat sub-bidang 5 yang mencakup penanggulangan bencana,

termasuk erupsi gunung. Dalam waktu singkat pemerintah desa bersama BPD bersepakat untuk mengalokasikan dana tambahan guna penanggulangan bencana. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan sembako bagi 779 kepala keluarga.

Bantuan ini kemudian berlanjut hingga meletusnya gunung Lewotobi laki-laki pada 4 November 2024 yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Desa Boru, kemudian letusan susulan pada 20 Maret 2025 dan masih berlangsungnya erupsi sampai dengan saat ini. Namun pada periode ini, bantuan yang diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diprioritaskan bagi masyarakat yang rentan sakit serta memiliki tanggungan dalam rumah. Hal ini menimbulkan ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat, karena mereka merasa bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dilakukan secara adil dan menimbulkan keraguan dari masyarakat.

Peran APBDes dalam penanganan bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen keuangan penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan di tingkat desa, termasuk dalam penanganan bencana. Dalam situasi darurat, pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola APBDes secara efektif agar dapat digunakan untuk penanggulangan bencana, pemulihan pasca bencana, serta mendukung rehabilitasi dan konstruksi wilayah terdampak.

Meskipun APBDes dapat menjadi sumber daya yang signifikan dalam penanganan bencana, pengelolaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hal ini bisa terkait dengan terbatasnya alokasi anggaran, kurangnya perencanaan yang tepat, serta hambatan birokrasi yang memperlambat pencairan dana saat kondisi darurat. Studi kasus pada Desa Boru penting untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan APBDes di desa tersebut telah digunakan secara optimal dalam penanganan erupsi gunung.

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana, seperti Desa Boru, mengelola APBDes untuk merespons situasi darurat. Dengan menganalisis pengelolaan APBDes, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta efisiensi penggunaan anggaran desa dalam penanganan bencana.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Pengelolaan APBDes**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan APBDes adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi,

disiplin anggaran, dan keadilan. Melalui APBDes pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penyediaan anggaran dalam situasi darurat. Pengelolaan APBDes dalam konteks bencana memerlukan fleksibilitas yang tinggi karena dana desa seringkali telah dialokasikan untuk kegiatan rutin tahunan. Realokasi anggaran merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat ketika terjadi bencana.

### **Manajemen Bencana**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan. Tahapan manajemen bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Dalam konteks desa, peran pemerintah desa sangat penting karena mereka berada pada level terdekat dengan masyarakat terdampak. Pemerintah desa tidak hanya bertugas sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam hal penggunaan anggaran darurat.

### **Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait pengelolaan keuangan desa dalam kondisi darurat. Misalnya, penelitian oleh Setiawan (2020) menunjukkan bahwa realokasi APBDes dapat menjadi solusi dalam penanganan darurat bencana, meskipun sering terkendala regulasi yang ketat. Penelitian lain oleh Lestari (2021) menekankan pentingnya koordinasi antara pemangku kepentingan agar penggunaan dana desa lebih efektif dalam membantu masyarakat terdampak. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat fleksibilitas penganggaran desa, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana secara tepat dan cepat. Hal ini relevan dengan penelitian mengenai APBDes dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya terkait praktik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi. Menurut Sugiyono (2010:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang sering disebut juga sebagai paradigma interpretif dan konstruktif.

Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik (menyeluruh), kompleks, dinamis, penuh makna. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2012:139) data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa pengantara. Data primer pada penelitian ini adalah melalui wawancara narasumber atau observasi langsung.

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2012:141) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

#### **1. Wawancara**

Menurut Anwar (2011:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa seperti, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat, serta mencatat kejadian serta informasi yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

#### **2. Dokumentasi**

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan, Anwar (2011:114)

Dokumentasi adalah untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen berupa data-data pada suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.

### 3. Observasi

Menurut Anwar (2011), observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Jadi observasi penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa yang dikenal saat ini berawal dari istilah *Lewo* atau *Rian*, yang secara tradisional digunakan untuk menyebut wilayah permukiman atau kampung. Istilah “Desa” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki makna “Tanah Asal”. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, Desa Boru berawal dari komunitas kecil yang hidup secara berkelompok dan memulai kehidupan mereka di wilayah yang dikenal dengan nama Ile Wengot. Desa Boru juga mempunyai semboyan “Boru Tanah Bojang, Kebo Kili Batu” pada hakekat mengandung sosok multi dimensi, baik sosial budaya kemasyarakatan serta kekerabatan.

Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, merupakan salah satu desa terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga letusan gunung berapi ini menimbulkan kerugian besar pada sektor pertanian, menurunkan pendapatan keluarga, serta mengganggu akses kesehatan dan pendidikan. Pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan darurat, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### Perencanaan Anggaran Darurat

Perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan perwakilan masyarakat terdampak. Musyawarah menghasilkan keputusan realokasi APBDes Tahun Anggaran 2023 untuk penanganan darurat erupsi. Tahapan perencanaan meliputi: Inderifikasi kebutuhan mendesak seperti bantuan pangan, BLT, dan dukungan logistik tim gugus. Penyerahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan memasukan pos penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, kemudian penetapan melalui peraturan desa agar legalitas realokasi anggaran terjamin. Keputusan perencanaan

menekankan prinsip partisipasi dan akuntabilitas, sejalan dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014.

### **Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran**

Berdasarkan keputusan musyawarah, dana desa direalokasi dengan rincian berikut ini:

**Tabel 1. Pembagian Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana Desa Boru**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
1	BLT untuk 32 KPM selama 12 Bulan	115.200.000	67,30%
2	Belanja Barang Kebutuhan Pokok (beras, telur, mie instan, minyak gorengan)	21.221.000	12,39%
3	Konsumsi tim gugus (makan dan minum)	1.129.000	0,66%
4	Operasional tim gugus	3.650.000	2,13%
<b>Sub-total belanja barang &amp; operasional</b>		<b>26.000.000</b>	<b>15,18%</b>
<b>Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>		<b>171.200.000</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Desa Boru*

Pelaksanaan anggaran menempatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai prioritas tertinggi. Selain itu, pemerintah desa menyalurkan bantuan logistik berupa beras, telur, mie instan, dan minyak goreng serta mendukung operasional tim gugus tugas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, dengan mekanisme pencairan dana melalui rekening desa dan pencatatan bukti transaksi.

## **Penatausahaan**

Tahap penatausahaan dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi keuangan untuk tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi tercatat dengan rapi dan sesuai regulasi. Proses ini melibatkan: Pencatatan transaksi harian, rekonsiliasi berkala, penerapan aplikasi siskeudes, dan pengawasan internal. Hasil temuan, penatausahaan berjalan tertib meskipun terdapat keterbatasan jaringan internet dan akses transportasi pasca erupsi. Pemerintah desa tetap mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat.

## **Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

Setelah pelaksanaan, pemerintah desa menyusun: Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan ke Bupati Flores Timur melalui Camat Wulanggitang, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa, yang memuat rincian penggunaan dana, bukti pembelanjaan, dan dokumentasi kegiatan. Laporan keuangan diverifikasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa pertanggungjawaban. Walaupun ada keterlambatan pelaporan akibat akses komunikasi dan transportasi yang terganggu, seluruh kewajiban administrasi berhasil diselesaikan.

## **Pembahasan Teoritis dan Penelitian Terdahulu**

Temuan ini mendukung teori *stewardship*, yang menekankan peran aparatur desa sebagai pengelola dana publik untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Setiawan (2020) dan Lestari (2021) yang menyoroti pentingnya fleksibilitas anggaran desa dan koordinasi lintas pemangku kepentingan pada situasi darurat. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pemerintah Desa Boru mampu mengelola APBDes secara adaptif, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa: Penelitian ini menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Boru dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi telah dilakukan secara adaptif dan responsif. Pemerintah desa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat terdampak melalui penyaluran (BLT), penyediaan bantuan pokok, serta dukungan operasional tim penanggulangan bencana. Realokasi anggaran menjadi langkah utama, meskipun terkendala oleh keterbatasan fleksibilitas regulasi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, dan kapasitas aparatur desa yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, APBDes terbukti menjadi instrumen penting dalam mempercepat penanganan darurat bencana di tingkat desa. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan fleksibilitas anggaran dan peningkatan kapasitas aparatur desa pada kondisi darurat bencana.

## REFERENSI.

- Abdullah. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bumi Aksara.
- Adiyoso. (2018). *Pengantar Penanggulangan Bencana*. Amerika Media.
- Ayuni, Q., & Nasya, H. S. (2021). Urgensi pembentukan peraturan desa tanggap bencana. *Jurnal of Public Policy*, 4(1), 99–104.
- Isnaini, M., & Rahmawati, T. (2024). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 5(2), 88–100.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Lestari, D., Miftah, A., & Hapsari, R. (2020). Implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam situasi darurat bencana. *Jurnal Akuntansi dan Peradaban*, 10(1), 61–72.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). *Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Prastika, S. (2020). Desa tangguh bencana tanah longsor. *Jurnal of Public Health Research and Development, Special* (1), 181–190.
- Rangga, A., & Sanga, K. P. (2022). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan anggaran 2021/2022 (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehen Kabupaten Flores Timur). *Student Scientific Creativity Journal*, 15, 46–52.
- Rasyid, R. (2020). *Kewirausahaan dan Pengelolaan Dana Desa*. CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutardjo Kartohadikusumo. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grafika Offset.

- Wahyudi. (2019). *Kumpulan Teori Bisnis*. Bandung: PT Niaga Kerta.
- Wulur, J., Kawur, A., & Topor, L. (2021). Analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 34–52.
- Wulansari, E. (2020). Manajemen bencana gunung berapi berbasis masyarakat. *Jurnal of Public Health Development, Special* (1), 205–214.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Sekretariat Negara.